

Kesehatan Ibu-Anak

PKBI Yogyakarta untuk Ibu Hamil di Penjara : Sebuah Perspektif Kesehatan Masyarakat

Ester Febe

Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, data terkait perempuan hamil di penjara masih terbatas. Data nasional menunjukkan jumlah perempuan yang dipenjara meningkat dari 1.807 pada tahun 2000 menjadi 11.465 pada tahun 2017. Pada tahun 2016, dari 464 lembaga pemasyarakatan dan penahanan di Indonesia, hanya 10 yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Data Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI sampai dengan Desember 2017 menunjukkan, 49% Rutan/Lapas dari total 507 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) melaporkan terdapat 56 orang ibu hamil. Kecilnya jumlah populasi ini menyebabkan keberadaannya sering terabaikan.

Meski hukum di Indonesia telah mengatur hak-hak dasar bagi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu dikaji ulang apakah hak – hak tersebut telah terpenuhi seutuhnya, atau justru sebaliknya. Keterbatasan sumber daya dan kondisi *overcrowded* sering mengakibatkan kebutuhan perempuan di lembaga penahanan tidak terpenuhi.

TUJUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta, melalui sudut pandang *public health*.

METODE

Penulis melakukan *Systematic Review* melalui pencarian dengan *Google Scholar* untuk memperoleh gambaran terkait masalah pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta. Penelusuran dilakukan dengan cara memasukkan kata "hamil" "lapas" "yogyakarta".

HASIL

Didapatkan hasil sebanyak 275 karya ilmiah (skripsi, thesis, jurnal), namun hanya 6 yang sesuai dan dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta. Kendati demikian, kesemuanya tidak ditulis oleh tenaga kesehatan, masih terbatas pada sudut pandang hukum, sehingga pembahasan terkait pelayanan kesehatan masih kurang mendalam.

Diperoleh gambaran masalah pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil di Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta, sebagai berikut :

- ❑ Lapas Khusus Perempuan Yogyakarta baru berpisah dari Lapas Kelas IIA Wirogunan sekitar tahun 2017, sehingga belum memiliki poliklinik Lapas sendiri. Ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan juga masih bergabung bersama Klinik Lapas Kelas IIA Wirogunan.
- ❑ Pembinaan kondisi ibu hamil masih berfokus ke hilir, yaitu hanya diberikan jika narapidana membutuhkan, misalnya sakit, dan atau terdapat gangguan dengan kehamilannya.
- ❑ Warga Binaan Perempuan (WBP) hamil hanya diberi vitamin penambah darah saja.
- ❑ Poliklinik Lapas Wirogunan tidak mengelola anggaran maupun obat. Obat-obatan sudah disediakan oleh bagian umum.

Dampaknya :

- Pernah terjadi keguguran pada WBP yang tidak mengetahui bahwa kondisinya sedang hamil, padahal sebelum masuk Lapas sudah di tes kehamilan.
- Meninggalnya janin dalam kandungan WBP yang hamil 8 bulan.
- Terdapat perempuan hamil dengan epilepsi yang tidak mengonsumsi obat secara rutin karena keterbatasan dana.

PEMBAHASAN

Mengingat banyaknya masalah tersebut, usulan program yang dirasa paling efektif ialah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (LSM) PKBI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil. PKBI Yogyakarta mengembangkan Pusat Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi dengan melakukan advokasi pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) melalui Klinik Adhiwarga. Klinik Adhiwarga memiliki layanan *Drop In* dan *Mobile Clinic*. Adapun Jenis layanan yang diberikan adalah konseling kesehatan reproduksi dan seksual, serta pemeriksaan Obstetri-Ginekologi. Program kerjasama dengan PKBI merupakan bentuk preventif untuk mencegah keterlambatan penanganan kesehatan bagi WBP hamil di Lapas. Pelaksana program ini adalah Lapas khusus perempuan di Yogyakarta, dapat dibantu oleh Dinas Kesehatan untuk monitoring program. Pihak Lapas dan PKBI harus menandatangani surat pernyataan sejenis MOU kerjasama untuk melaksanakan program tersebut, sehingga mengikat kedua belah pihak untuk tidak mencoba melanggar kerjasama. Bagi Kanwil Kemenkumham Yogyakarta dapat membantu pelaksanaan program dengan mengeluarkan regulasi *Performance Based Contracting* tenaga kesehatan

untuk mengatasi ketiadaan Klinik Lapas guna memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP hamil, sebab pada akhirnya program kerjasama ini akan membantu pihak lapas dalam memelihara kesehatan warga binaannya.

KESIMPULAN

Ketidajelasan data mengenai kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang hamil di institusi penahanan berpotensi menimbulkan pelanggaran bagi hak janin dalam kandungan. Paradigma patriarkal yang terkonstruksi di masyarakat bahwa tindak kejahatan oleh perempuan dianggap tidak wajar mengakibatkan kebijakan di institusi penahanan belum sensitif gender. Kerjasama dengan LSM (Pihak ketiga) berpeluang untuk dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999, yang isinya menyatakan mengizinkan permohonan kerjasama pembinaan dan atau pembimbingan bidang kesehatan.

REFERENSI

- Arifat N. (2018). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Banks C. (2003). *Woman in Prison: A Reference Handbook*. California : ABC-CLIO Inc.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kedubes Australia - The Asia Foundation - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2008). *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjenl Pemasyarakatan
- Desborn. (2018). *Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta*. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Dewi. (2014). *Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta*. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Kemenkes RI. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Dewasa di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Kemenkes RI
- Kresnadari. (2018). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* . Vol.6 No.2
- Mustofa M. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Depok : FISIP UI Press
- Mustofa, Brooke S. West, Mamik Sri Supadmi, Herlina Sari. (2019). *Challenges to mothering while incarcerated: preliminary study of two women's prisons in Java, Indonesia*, *International Journal of Prisoner Health*, Vol. 15 Issue: 1, 37-45
- Naffine N. (1997). *Feminism and Criminology*. Cambridge : Oxford Polity Press
- PKBI D.I Yogyakarta. (2019). *KLINIK ADHIWARGA PKBI DIY*. Retrieved from <https://pkbi-diy.info/adhiwarga/>
- Sianturi (2014). *Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil Serta Hak Anak Sejak Dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan*. Thesis. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Walmsley R. (2017). *World Female Imprisonment List: Women and Girls In Penal Institutions, Including Pre-Trial Detainees/Remand Prisoners*. International Centre for Prison Studies, King's College London, London.
- Widyastuti AA. (2018). *Implementasi Hak Dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Winarso, dkk. 2013. *Membangun kembali organisasi berbasis gerakan : IPPA as a movement based organization Annual Report*. Jakarta : PKBI
- UNODC. (2019). *Tools and strategies for service providers working with female prisoners*. Policy Brief Country Office Pakistan [online]. Available at: https://www.unodc.org/documents/pakistan/briefs%202/Briefs_and_strategies_for_NGOs_working_with_Female_Prisoners_B_opt.pdf